

Kampanye dan Perjuangan PDI dalam Pemilu 1992

Soerjadi

Pendahuluan

Berbicara tentang kampanye dan perjuangan PDI dalam Pemilu 1992, satu hal pertama yang perlu dikemukakan adalah apa dan siapa sebenarnya PDI itu dalam konteks sistem politik di Indonesia. Selanjutnya perlu dipahami pula arti penting dan strategisnya Pemilu dan kampanye 1992. Kemudian, berdasarkan kedua hal tersebut akan dikemukakan program-program perjuangan PDI dalam menghadapi Pemilu 1992 yang akan datang.

Bagian pertama dari tulisan ini akan memberikan uraian mengenai hakikat dan jati diri PDI. Selanjutnya pada bagian kedua akan dikemukakan arti penting dan strategisnya kampanye dan Pemilu 1992. Dalam bagian ini pula akan diulas medan juang PDI dalam menghadapi kampanye dan Pemilu 1992. Selanjutnya, pada bagian ketiga akan dikemukakan program-program perjuangan PDI dalam rangka menyambut kampanye dan Pemilu 1992. Tulisan ini akan diakhiri dengan beberapa catatan penutup sebagai kesimpulan.

PDI: Hakikat, Eksistensi dan Jati Dirinya

PDI adalah sebuah Partai Politik yang lahir pada tanggal 10 Januari 1973 dalam rangka pembaharuan struktur dan kehidupan politik menuju sistem kepartaian yang terbuka untuk semua warga negara tanpa perbedaan suku, keturunan, dan agama, sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaannya. PDI merupakan hasil fusi dari lima partai, yaitu PNI, Partai Katolik, Parkindo, Murba, dan IPKI.¹

Karena PDI adalah partai terbuka, maka setiap warga negara Indonesia tanpa dibedakan asal usulnya dapat diterima menjadi anggota. Persyaratan untuk menjadi anggota adalah: warga negara Indonesia, dan yang bersangkutan harus mengajukan per-

¹Lihat Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia dalam *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI* (Jakarta: DPP PDI, 1989). Lihat juga dalam buku yang sama, 25-27.

mintaan kepada pengurus di mana mereka tinggal, serta menyetujui Piagam dan Program Perjuangan Partai, AD/ART serta peraturan-peraturan organisasi PDI.²

Pada dasarnya kelima Partai Politik yang berfusi tersebut memiliki latar belakang sejarah dan jati diri yang satu sama lain berbeda. Meskipun demikian, karena tuntutan perjuangan Bangsa yang digerakkan oleh semangat Orde Baru, demi kepentingan nasional maka kelima Partai Politik itu sepakat untuk melebur diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.³

Dengan latar belakang itu, dapat dikatakan bahwa PDI adalah anak kandung Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat. PDI, sebagai sarana dan penegak Demokrasi Pancasila, menjadi wadah pemersatu dan sarana perjuangan rakyat untuk secara sadar menggunakan kedaulatan dan hak berorganisasi serta secara tertib, tenteram, bebas dan terbuka menyalurkan aspirasinya dalam rangka menunaikan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya untuk mempertahankan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Sebagai konsekuensinya, PDI sepenuhnya melaksanakan fungsi partai dalam

²Untuk mengetahui lebih jelas syarat-syarat menjadi anggota PDI lebih lanjut lihat Anggaran Dasar PDI Pasal 6 dan Anggaran Rumah Tangga PDI Pasal 2 s/d 15.

³Lihat ADIART PDI, Pasal 2

⁴Lihat Keputusan Kongres Ke III PDI di Jakarta, 15-18 April 1982, No. VIII/KPTS/Kongres III/PDI/IV/1986 tentang Piagam Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia, Lampiran I, I. A.

alam Demokrasi Pancasila, yaitu sebagai: (1) penghimpun, perumus dan penyalur hasrat dan tekad Rakyat; (2) pendidik dan pembina rakyat untuk mempertinggi akhlak dan kecerdasannya, memperdalam kesadaran akan hak dan kedaulatannya serta meningkatkan rasa tanggung jawabnya akan beban dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dan imbalan hak dan kedaulatan tersebut; (3) pengerah dan penggerak Rakyat untuk mewujudkan partisipasi yang bergairah dan ikhlas dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan serta proses politik bangsa Indonesia; dan (4) penyelenggara seleksi wakil/pimpinan politik untuk memantapkan pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.⁵

Sesuai dengan nama dan latar belakang sejarah kelahiran serta sistem keanggotaannya, maka PDI sebagai partai politik yang bernafaskan demokrasi akan selalu memperjuangkan pelaksanaan demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Sejalan dengan hakikat PDI sebagai partai dari rakyat, oleh rakyat dan berjuang untuk rakyat, maka dengan tegas PDI memperjuangkan dan selalu memihak kepada kepentingan rakyat, lebih-lebih rakyat kecil dalam perjuangannya memperbaiki nasibnya, mengangkat harkat, martabat dan derajatnya ke tahapan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sesuai dengan sifat keterbukaannya, PDI adalah Partai yang berwawasan kebangsaan⁶ yang lazim dikenal dengan Wa-

⁵Lihat Lampiran I, Keputusan No. VIII/KPTS/KONGRES III/PDI/IV/1986, ibid.

⁶Lihat Lampiran I Keputusan Kongres Ke III PDI di Jakarta, 15-18 April 1986, No. VIII/KPTS/KONGRES III/PDI/IV/1986 tentang Piagam Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia.

wasan Nusantara, yaitu Indonesia dalam pengertiannya yang seluas-luasnya: sebagai satu kesatuan geografis, geopolitik, geoekonomi, geososio-budaya maupun geostrategis. Karena itu PDI akan selalu mengatasi setiap ancaman terhadap kepentingan dan integritas bangsa dan negara Indonesia, dan akan memperjuangkan hilangnya setiap bentuk kesenjangan baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Sebab hal-hal demikian bertentangan dengan semangat dan Wawasan Nusantara serta tidak sesuai dengan semangat kebangsaan dan cita-cita demokrasi Pancasila.

Kedudukan, Fungsi, Hak Dan Kewajiban PDI

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, PDI mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat dengan PPP maupun Golkar.⁷ Baik PDI, PPP, Golkar, dan juga ABRI, kesemuanya adalah modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸

Fungsinya adalah sebagai penyalur pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak-hak politik rakyat dengan melaksanakan komunikasi sosial timbal balik, merumuskan gagasan-gagasan atau pemikiran yang berguna bagi keberhasilan pembangunan yang diperjuangkan secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kecuali itu juga berfungsi sebagai wadah

⁷Lihat Pasal 1 UU No. 3/1975 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

⁸Tap II/MPR/1988 tentang GBHN, Bab IV.D. sub bidang Politik, butir 1, huruf f dan Bab II. D. butir I, huruf g dan h.

pendidikan kesadaran politik rakyat, agar mereka menjadi warga negara Republik Indonesia yang bermoral Pancasila, setia terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mempunyai wawasan dan disiplin nasional untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.⁹

Hak-haknya antara lain adalah menjadi Organisasi Peserta Pemilu (OPP)¹⁰ dengan segenap konsekuensinya. Di antaranya ialah mengajukan calon-calon anggota lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang akan dipilih dalam Pemilu untuk merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan nasional serta mengontrol pelaksanaannya. Kecuali itu berkampanye untuk mendapatkan simpati dan dukungan yang sebanyak-banyaknya dari para pemilih.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa yang membedakan PDI dengan yang lainnya pada dasarnya bukan ideologi melainkan perilaku politiknya dan aksentuasi program-program perjuangannya.

Sesuai dengan pengertian teoritis bahwa partai politik merupakan sekumpulan warga negara yang tergabung dalam suatu kesatuan organisasi yang memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan kedudukan politik,¹¹ maka perjuangan PDI

⁹Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) No. 19/1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/1985.

¹⁰Lihat Pasal 7 PP No. 19/1986 tentang Pelaksanaan UU No. 3/1985 mengenai Partai Politik dan Golongan Karya.

¹¹Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1977), hal. 160-161. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: PT Eresco, 1981), 100.

untuk mencari dukungan rakyat pemilih dalam Pemilu akan selalu dilakukan dengan menjunjung tinggi asas kejujuran serta sportivitas. Kedudukan atau kursi yang diperoleh di lembaga-lembaga negara tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi atau Partai, tetapi untuk memperjuangkan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Makna Strategis Kampanye dan Pemilu 1992

Seperti diketahui, pada tahun 1992 mendatang akan dilaksanakan Pemilu yang ke-5 dalam masa Orde Baru. Telah menjadi kelaziman bahwa setiap kali menjelang diselenggarakannya Pemilu selalu didahului dengan suatu kampanye.

Dalam suatu negara demokrasi, Pemilu memiliki arti yang sangat penting dan strategis, sebab Pemilu diartikan sebagai lambang dan sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri.¹² Setiap negara yang mengaku menganut demokrasi selalu menyelenggarakan Pemilu, tetapi tidak semua negara yang menyelenggarakan Pemilu mesti negara demokratis. Banyak negara yang tidak demokratis menyelenggarakan Pemilu hanya untuk mendapatkan legalisasi kekuasaannya.

Dalam konteks sistem politik di Indonesia, Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Berbeda dengan di banyak negara lain, penyelenggara Pemilu di Indonesia ialah Presiden/Mandataris MPR dengan memberikan peranan kepada Organisasi Peserta Pemilu (OPP)

¹²Lihat Miriam Budiardjo, "Sistem Pemilu dan Pembangunan Politik" (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional VI dan Kongres Nasional II Asosiasi Ilmu Politik Indonesia di Jakarta, 11-15 Februari 1991), 2.

dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia.¹³

Tujuan Pemilu ialah untuk: (1) memilih wakil-wakil Rakyat yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam pembangunan nasional guna memenuhi dan mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;¹⁴ (2) menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien sehingga dapat memperkuat kehidupan konstitusional, mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa. Kecuali itu juga bertujuan agar DPR dapat melaksanakan pengawasan yang efektif dan demi terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin mantap.

Sebagai tahapan dari proses demokrasi Pancasila, setelah Pemilu akan dilaksanakan Sidang Umum MPR untuk mengambil keputusan politik rakyat dalam bentuk program-program pembangunan nasional untuk masa lima tahun berikutnya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup Rakyat. Kecuali itu, juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang ditugaskan memimpin pelaksanaan kehendak Rakyat tersebut.

Berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya, Pemilu 1992 mempunyai arti yang

¹³Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR-RI/1988 tentang GBHN, sub bidang Politik, butir 1, huruf e, dan Tap No. III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum. Lihat pula UU No. 1/1985 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1, 8, dan 13 a.

¹⁴Lihat Pasal 1 UU No. 1/1985 tentang Pemilihan Umum sebagai perubahan ke-3 terhadap UU No. 15/1969 tentang hal yang sama. Lihat juga Penjelasan Umum butir 2, Tujuan Pemilihan Umum.

sangat strategis bagi perjalanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, tidak saja untuk rentang waktu lima tahun berikutnya, tetapi lebih dari itu, untuk masa 25 tahun berikutnya dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang akan mengantarkan bangsa Indonesia memasuki era tinggal landas agar dapat ikut serta dalam percaturan global secara lebih berarti di abad ke-XXI.

Sasaran utama pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir maupun batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila.¹⁵ Sasaran utama ini harus dapat dijabarkan dan dirumuskan serta ditetapkan oleh MPR pada SU-nya tahun 1993 dalam bentuk garis-garis besar haluan negara.

Kampanye Pemilu, sebagai sarana kegiatan OPP untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilu, dilaksanakan dengan menawarkan program-program yang disusun oleh Partai dalam rangka mengisi Pembangunan Nasional selama lima tahun berikutnya. Bagi PDI, kampanye juga akan dipergunakan sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat secara terbuka dan langsung, karena pada saat itu, pada umumnya rakyat dapat secara bebas mendengarkan dan menilai program-program OPP yang melakukan kampanye. Jadi bukan seperti yang terjadi selama ini, kampanye lebih diartikan sebagai rapat Organisasi yang hanya dihadiri oleh warga Partainya karena rakyat pada umumnya dibatasi kebebasannya dengan segala cara untuk mendengarkan kampanye PDI, atau sebaliknya mereka dimobilisasi

dengan berbagai cara untuk mendengarkan kampanye OPP yang lainnya.

Seharusnya kampanye merupakan sarana OPP untuk mengkomunikasikan cita-cita dan program perjuangannya mengenai kehidupan masyarakat dan negara yang diinginkan di masa mendatang melalui pelaksanaan sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosio-budaya serta sistem pertahanan keamanan. Sesuai dengan sifat Pemilu 1992 yang mempunyai arti khusus, maka kampanye Pemilu 1992 seharusnya mengandung tujuan setidak-tidaknya untuk mencapai dua hal. Pertama, memuat suatu penilaian mengenai apa yang telah dicapai dan apa yang tidak atau belum dicapai dalam pelaksanaan pembangunan nasional periode sebelumnya. Kedua, menawarkan program-program dan gagasan-gagasan kepada masyarakat pemilih mengenai masyarakat, bangsa dan negara yang ingin dicapai pada periode berikutnya. Dengan kata lain, kampanye Pemilu 1992 harus dapat dipergunakan sebagai momentum untuk melakukan mawas diri dan sekaligus memantapkan langkah-langkah perjuangan ke depan demi tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan amanat Rakyat bahwa pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia atau sebagai pengamalan Pancasila.

Dalam medan dan semangat seperti itulah PDI mempersiapkan diri memasuki arena kampanye dan Pemilu 1992 serta SU-MPR 1993 mendatang.

Refleksi Perjalanan Kehidupan Bangsa dan Negara Selama 25 Tahun Terakhir

Penilaian atas perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

¹⁵Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN, Bab IV. POLA UMUM PELITA KELIMA, A. PENDAHULUAN, butir 2.

selama sekitar 25 tahun terakhir ini akan mencakup dua hal sekaligus, yaitu penilaian yang bersifat umum dan yang bersifat lebih khusus, yaitu tentang praktek pelaksanaan sistem politik berdasarkan aturan-aturan demokrasi Pancasila. Sehubungan dengan ini diperlukan tolok ukur tertentu.

Ada dua hal yang dapat dikemukakan sebagai pedoman penilaian tersebut. Pertama, keyakinan PDI "bahwa tidak ada program yang lahir tanpa ide, cita-cita dan tujuan hidup, sehingga sesungguhnya tidak ada program yang lahir tanpa ideologi. Bagi PDI landasan idiil tersebut adalah Pancasila. Sebab Pancasila mampu menjawab setiap tantangan dan hambatan serta juga yang merupakan produk fundamental dan normatif untuk kehidupan Negara dan mentalitas serta martabat Bangsa, seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu, PDI menyadari dan menghayati betapa pentingnya landasan idiil itu karena dengan jelas memberikan arah dan tujuan yang pasti."¹⁶

Kedua, konsensus nasional bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia¹⁷ dan bahwa pembangunan nasional merupakan pengamalan semua sila dari Pancasila secara bulat dan utuh.¹⁸

Atas dasar keyakinan, penghayatan dan pengamalan ideologi perjuangan tersebut, maka Pancasila harus kita tempatkan sebagai tolok ukur untuk menilai pelak-

sanaan pembangunan nasional yang telah kita laksanakan selama seperempat abad ini maupun untuk penyusunan program perjuangan dalam masa 25 tahun ke depan. Sehubungan dengan itu, yang menjadi pertanyaan adalah: apakah yang telah kita capai selama lebih kurang 25 tahun ini telah benar-benar merupakan pengamalan Pancasila; dan apakah kenyataan hidup dan kondisi kehidupan yang merupakan produk pembangunan nasional selama ini telah benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Meski harus diakui bahwa berkat kerja keras selama sekitar 25 tahun, pembangunan ini memang telah menghasilkan sedemikian banyak kemajuan dan kenikmatan yang pantas kita syukuri, tetapi rasa syukur itu seharusnya tidak membuat kita menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang masih melekat dalam diri Bangsa dan Negara kita. Sebab Ketetapan MPR No. II/MPR-RI/1988 tentang GBHN antara lain menyatakan dengan tegas masih "adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedangkan di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional,"¹⁹ yang menurut pengakuan Pemerintah sendiri jumlahnya masih cukup besar, yaitu sekitar 30 juta jiwa. Belum lagi apabila kita menengok kenyataan hidup sehari-hari ke seluruh wilayah Nusantara kita. Di banyak bidang kehidupan masih dapat dijumpai terjadinya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, misalnya hasil pema-

¹⁶Lihat Lampiran 1 Keputusan Kongres Ke III PDI No. VIII/KPTS/Kongres III/PDI/IV/1986 tentang Piagam Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia, Romawi I. B. 1. Landasan Idiil Perjuangan PDI.

¹⁷Lihat Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN, Bab II. B.

¹⁸Ibid., Bab IV. POLA UMUM PELITA KELIMA, A. 5.

¹⁹Lihat Tap MPR No. II/MPR-RI/1988 tentang GBHN, Bab III. B. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG, butir 6.

ngunan prasarana dan sarana hidup, kesenjangan dalam memperoleh pendidikan, kesempatan berusaha, kesempatan memperoleh lapangan kerja yang layak bagi kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum, dalam melaksanakan hak-hak politik dan lain sebagainya.

Kekurangan-kekurangan tersebut secara umum dapat dikonstatasikan dengan rumusan-rumusan problematik yang pantas kita prihatinkan dengan menggunakan tolok ukur nilai-nilai Pancasila seperti berikut ini:

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang (*fighting nation*) yang digerakkan oleh nilai-nilai dan semangat perjuangan, pengabdian dan pengorbanan. Sehingga sikap dan gaya hidupnya haruslah selalu selaras dengan nilai-nilai tersebut. Namun sekarang ini pendapat umum telah menyimpulkan bahwa sifat dan gaya hidup materialistis, individualistis dan konsumeristis lebih dominan dan telah menggeser sifat sederhana dan gotong-royong, kebersamaan dan solidaritas dan lain-lain yang justru menjadi basis kekuatan perjuangan bangsa;
2. Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai "keadilan sosial bagi segenap bangsa Indonesia" dihadapkan pada kenyataan makin melebarnya kesenjangan yang bersifat struktural dalam pembagian kesempatan dan kenikmatan. Kesenjangan antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur, antara kota dan desa, antara sektor modern dan sektor tradisional. Belum lagi antara konglomerat yang siap berada di arena internasional berhadapan dengan 30 juta rakyat yang hidupnya masih berada di bawah garis kemiskinan;
3. Pancasila mengajarkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

negara hukum" (supremasi hukum), namun dalam kenyataannya hukum yang harus kita tegakkan itu masih banyak yang merupakan warisan kekuasaan kolonial yang tujuannya dulu untuk membela dan melestarikan kekuasaan kolonial. Hal ini masih ditambah lagi dengan kenyataan bahwa asas supremasi hukum masih lemah di mana keadilan sering diperjualbelikan dan jika terjadi sengketa hukum antara rakyat kecil dengan pemilik modal, maka pemerintah cenderung membela pemilik modal;

4. Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun kenyataan menunjukkan bahwa makin tahun makin meningkat jumlah pengangguran. Hal ini bersumber dari kelemahan program penciptaan lapangan kerja dan muatan sistem pendidikan nasional yang tidak dikaitkan dengan kebutuhan tenaga kerja;
5. Sistem politik Indonesia yang didasarkan pada Demokrasi Pancasila menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Namun kenyataannya Lembaga-lembaga Demokrasi itu masih tetap dalam posisi yang lemah dalam melaksanakan fungsinya. Fungsi kontrol dan hak budget lembaga perwakilan rakyat misalnya, masih lemah karena sarana dan prasarananya kurang memadai atau karena dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Infrastruktur politik seperti Partai Politik, Ormas dan Pers belum dapat memainkan peranannya sebagaimana yang diharapkan karena dalil-dalil demi stabilitas politik dan demi pertumbuhan ekonomi ataupun karena pembatasan lain dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.

Kesadaran politik rakyat seringkali dimanipulasi demi kepentingan situasional dan insidental; dan bahkan tidak jarang orang/pejabat/golongan yang bertanggung jawab dalam pembangunan bidang politik sering melakukan langkah/kebijaksanaan yang justru merusak kesadaran politik rakyat. Birokrasi yang seharusnya menjadi aparat pelayanan umum serta bertindak jujur dan adil, secara struktural telah memihak kepada salah satu Organisasi Sosial Politik (OKSP);

6. Demokrasi Pancasila menganut asas kekeluargaan, kebersamaan dan kegotongroyongan; tetapi sering terjadi partai-partai politik tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan GBHN secara nyata, misalnya dalam Kabinet dan lembaga-lembaga/forum yang seharusnya mencerminkan asas-asas tersebut;

7. Peraturan perundangan yang berlaku menetapkan bahwa semua OKSP memiliki kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dan sederajat. Namun dalam kenyataannya sering dijumpai adanya perlakuan yang tidak adil terhadap OKSP dalam kehidupan masyarakat dan negara, misalnya dalam merekrut kader, pelayanan oleh aparat birokrasi, dalam memperoleh dana dari masyarakat dan negara, memanfaatkan sarana dan prasarana umum, menjalin hubungan ormas-ormas dan lain sebagainya.

Program Perjuangan PDI Menghadapi Pemilu 1992

Penyusunan program dan agenda nasional dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia untuk masa mendatang pada dasarnya tidak berangkat dari titik nol, melainkan dari hasil-hasil pembangunan

yang telah kita laksanakan sebelumnya. Untuk menilai pembangunan nasional itu diperlukan adanya konsensus dan kriteria bahwa pembangunan nasional di segala bidang harus merupakan pengamalan Pancasila; sebab, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata secara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat, keberhasilan pembangunan nasional juga harus mencerminkan suasana kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk itu sasaran utama pembangunan nasional jangka 25 tahun diletakkan pada terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju, cerdas dan sejahtera lahir maupun batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap merdeka, bersatu dan berdaulat. Selain itu, telah menjadi konsensus bersama bahwa selama kurun waktu pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua yang akan dimulai pada tanggal 1 April 1994, bangsa Indonesia harus dapat memulai proses tinggal landas dengan kekuatan sendiri.

Dengan problematik dasar sebagaimana tergambar di atas, maka antisipasi penyusunan program perjuangan PDI menghadapi Pemilu 1992 dan menyongsong masa depan bangsa memasuki abad ke-XXI pada dasarnya akan difokuskan pada upaya-upaya penyelesaian masalah-masalah tersebut di atas. Medan juangnya meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan untuk kepentingan segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan fungsi dan

mekanisme demokrasi Pancasila yang demokratis tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial-budaya serta kemasyarakatan.

Untuk mencapai tujuan itu, PDI akan berjuang agar lembaga-lembaga politik dalam sistem demokrasi Pancasila dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga politik kenegaraan (supra struktur politik) diusahakan agar dapat terlaksana secara fungsional dan efektif tanpa ada sikap kerikuh-kerikuhan tertentu.

Lembaga-lembaga politik kemasyarakatan (infra struktur politik) seperti OKSP, Ormas dan Pers dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai sarana penampung dan penyalur aspirasi Rakyat serta sebagai sarana pendidikan politik Rakyat. Karena itu tidak selayaknya di masa mendatang pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dihambat dengan cara apa pun dan oleh siapa pun.

Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Karena itu hendaknya benar-benar diperlukan sebagai subyek pembangunan bukan sebagai obyek pembangunan. Kesejahteraan, kecerdasan dan kemajuannya harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sebagai pemilik kedaulatan, Rakyat Indonesia, baik itu orang tua, pemuda, pelajar, mahasiswa, laki-laki ataupun perempuan tidak dihambat untuk mengekspresikan hak-hak politiknya, keinginan, harapan maupun tuntutanannya bagi perbaikan nasib, derajat, harkat dan martabatnya.

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dan tahap awal dari suatu proses dan mekanisme demokrasi politik, hendaknya dapat benar-benar dilaksanakan secara jujur dan adil. Dalam pada itu, kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban setiap OPP yang sama dan sede-

rajat, hendaknya terejawantahkan dalam memperoleh kesempatan, dana, prasarana dan peserta kampanye.

Sistem dan mekanisme pemerintahan, hendaknya juga disusun berdasarkan demokrasi Pancasila yang dasarnya adalah musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, kekeluargaan serta kebersamaan. Selain itu, aparat pemerintah hendaknya selalu berpihak kepada rakyat kecil dan dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bersih, jujur, berdisiplin dan berwibawa. Akhirnya, asas negara Indonesia sebagai negara hukum pun seharusnya dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.

Target Group PDI

Seperti telah diuraikan sebelumnya, PDI adalah Partai yang terbuka dan akan selalu berjuang demi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen di segala bidang kehidupan segenap bangsa Indonesia. Karena sudah sewajarnya apabila PDI dapat diterima, didukung dan dipilih oleh segenap lapisan masyarakat sebagai sarana perjuangan untuk memperbaiki nasibnya.

Meskipun kampanye merupakan sarana bagi setiap OPP untuk mendapatkan dukungan pemilih yang sebanyak-banyaknya dalam pemilu, PDI tetap perlu menentukan *target group* yang ingin dicapai oleh karena sifatnya yang masih terlalu umum. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, *target group* yang ingin dicapai oleh PDI dalam menghadapi kampanye dan Pemilu 1992 antara lain (1) lapisan masyarakat miskin dan papa bukan hanya dalam artian kemiskinan dan kepapaan ekonomis, melainkan juga yang noneko-

nomis; (2) kaum wanita; (3) generasi muda, baik pemuda, pelajar maupun mahasiswa; (4) kelompok intelektual; dan (5) kelompok masyarakat usia lanjut (manula). Adapun dasar pemikirannya adalah seperti berikut.

Lapisan masyarakat miskin dan papa, terutama mereka yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, dijadikan *target group* PDI oleh karena sasaran pembangunan nasional adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini kenyataan menunjukkan bahwa jumlah kelompok masyarakat yang miskin dan papa itu masih cukup besar, yaitu sekitar 30 juta jiwa. Sesuai dengan keadaannya, mereka itu umumnya tidak memiliki kekuatan, keahlian, kemampuan serta keberanian untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Karena itu, mereka memerlukan corong yang dapat memperjuangkan kepentingannya. Meskipun demikian, PDI tidak bermaksud menyantuni mereka seperti layaknya panti asuhan; sebaliknya PDI akan tetap memperhatikan harkat dan martabatnya sebagai manusia dan sebagai subyek pembangunan yang mempunyai harga diri, hak hidup secara pribadi maupun dalam hubungannya dengan manusia yang lain dalam dimensi kesosialannya. Untuk itu upaya-upaya perbaikan nasib mereka itu perlu diatur dalam tata aturan perundangan, agar segenap pihak melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan terhadap pihak-pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum yang setimpal.

Sementara itu, kaum wanita juga dijadikan *target group* PDI oleh karena pentingnya peranan mereka dalam mendidik generasi bangsa Indonesia agar menjadi generasi yang berbudi luhur dan halus. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa peran wanita dalam kehidupan politik bangsa pada umumnya belum memper-

oleh perhatian dan tempat yang sewajarnya. Dalam hal ini, PDI merasa bangga oleh karena kaum wanita telah diberi tempat dan posisi yang cukup terhormat dalam personalia kepengurusannya. Bahkan PDI merupakan satu-satunya OKSP yang menempatkan wanita sebagai Ketua Fraksi di DPR. Hal ini kiranya sekaligus menjadi bukti mengenai besarnya perhatian PDI terhadap peranserta kaum wanita dalam kehidupan politik nasional yang akan tetap dipegang teguh di masa mendatang. Dengan memberikan tempat yang terhormat kepada kaum wanita, PDI bercita-cita menjadi Partai Politik yang berbudi halus dan luhur.

Generasi muda juga dijadikan *target group* oleh PDI karena semangat dan dinamika mereka dianggap sangat penting bagi gerak dan langkah perjuangan PDI di masa mendatang. Sejarah telah membuktikan pentingnya peran generasi muda, sebagaimana tercermin pada munculnya Angkatan 08, Angkatan 28, Angkatan 45 dan Angkatan 66. Karena PDI telah berani menyatakan diri sebagai Partai masa depan -- sedangkan masa depan bangsa dan negara ini terletak di tangan generasi muda -- maka PDI menaruh perhatian, harapan dan kepercayaan yang besar pada generasi muda. Untuk itu PDI merekrut generasi muda dalam jumlah yang cukup besar sebagai calon-calon anggota legislatif.

Kaum cendekiawan juga dijadikan *target group* PDI oleh karena perjalanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara di era tinggal landas yang bersamaan dengan terjadinya era globalisasi serta era abad iptek ini sangat membutuhkan kekuatan intelektual dan penalaran. Dalam kerangka pikir dan semangat tersebut, maka PDI juga merekrut para sarjana untuk memperkuat Badan Penelitian dan Pengembangan serta menominasikan banyak ilmuwan menjadi calon-calon anggota

legislatif dalam Pemilu 1992 mendatang.

Akhirnya, kaum manula juga dijadikan *target group* PDI oleh karena PDI ingin menjadi Partai Politik yang bijak bestari dalam ikut serta mengelola dan mengembangkan kehidupan bangsa dan negara ini di masa mendatang. Karena itu PDI juga merekrut para purna kerja menjadi calon-calon anggota legislatif dalam Pemilu 1992.

Melalui integrasi dan peleburan sifat-sifat menonjol dari masing-masing kelompok *target group* seperti tersebut di atas, PDI ingin menjadi penampung dan saluran aspirasi segenap aset nasional. Karena itu PDI berkeyakinan dapat selalu tanggap dan dinamis dalam memperjuangkan nasib rakyat kecil. Di samping itu, juga dapat bertindak secara intelektual dan bijaksana dalam melaksanakan peransertanya dalam mengelola perjalanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia di era yang akan penuh dengan tantangan dan perubahan, baik dalam lingkup nasional karena pengaruh perkembangan internal maupun karena pengaruh perkembangan global.

Penutup

Melalui pengungkapan pola pikir dan pendekatan serta program-program perjuangan seperti tersebut di atas, PDI berharap bahwa Rakyat akan tergerak hatinya dan tergugah pikirannya mengenai hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kecuali itu PDI berharap bahwa bagi mereka yang selama ini telah mendukung PDI akan makin mantap keyakinannya untuk tetap berada di barisan PDI; sedangkan bagi mereka yang belum atau bukan Anggota PDI diharapkan dapat memahami posisi,

jati diri, hakikat, tujuan dan program perjuangan PDI demi kepentingan segenap bangsa dan negara Indonesia, sehingga akhirnya bersimpati dan bersedia mendukung program-program PDI.

Berbeda dengan ketika akan memasuki Pemilu 1987, kali ini PDI memiliki waktu yang relatif cukup memadai untuk melakukan persiapan-persiapan guna mensukseskan program perjuangan tersebut. Karena itu PDI berkeyakinan bahwa dalam menghadapi Pemilu 1992 yang akan datang, PDI relatif lebih baik dan lebih siap sehingga akan memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan terjadinya perkembangan-perkembangan eksternal (di luar partai) yang positif prospek Pemilu 1992 diharapkan akan menjadi lebih baik lagi. Perkembangan positif itu dapat dilihat, antara lain dengan adanya jaminan bahwa segenap aparat penyelenggara Pemilu akan bertindak lebih jujur dan lebih adil sebagaimana berulang kali ditekankan oleh Kepala Negara maupun Menteri Dalam Negeri pada berbagai kesempatan yang diharapkan akan benar-benar berwujud dalam praktiknya di lapangan sampai ke pelosok-pelosok desa.

Sementara itu, ABRI pun telah mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sangat kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan gerak langkah serta partisipasi PDI dalam kehidupan politik nasional khususnya. ABRI telah memainkan perannya sebagai dinamisator dan modernisator kehidupan bangsa dan negara secara baik tanpa meninggalkan fungsinya sebagai inti kekuatan pertahanan keamanan negara. Lebih dari itu, seperti terlihat dari pernyataan para pimpinan ABRI sendiri, ABRI akan lebih meningkatkan peranannya dalam mendinamiskan kehidupan demokrasi bangsa dan negara kita di segala bidang.

